

# KATA PENGANTAR

Selama ini Indonesia dinilai berhasil dalam penindakan terhadap terorisme. Program penindakan yang terdiri dari kebijakan keamanan dan penindakan hukum sering disebut sebagai pendekatan keras (*hard approach*). Data terakhir menunjukkan bahwa 900 terduga teroris telah berhasil ditangkap. Penegakan hukum telah terbukti membawa para pelakunya ke meja hijau. Sebagian dari mereka telah dipenjarakan dan dihukum mati karena proses pengadilan yang transparan maka tidak heran mendapat apresiasi dari dunia internasional.

Namun demikian keberhasilan itu belum diikuti dengan keberhasilan dalam bidang pencegahan. Ancaman terorisme masih menghantui masyarakat. Penangkapan dan serangan terorisme masih terus berlangsung hingga saat ini. Beberapa NAPI teroris yang telah bebas bahkan telah kembali menjadi teroris dan tertangkap. Sementara itu, kelompok-kelompok mempunyai kedekatan ideologis kepada kelompok teroris, melakukan kritikan yang gencar kepada pemerintah dan secara ideologis berbeda dengan mereka. Singkat kata keberhasilan dalam bidang penindakan harus diikuti dengan program pencegahan atau yang sering dikenal sebagai pendekatan lunak (*soft approach*).

Undang-undang mengatur bahwa pencegahan terorisme melibatkan berbagai institusi kementerian pemerintahan dan masyarakat. Diantara lembaga pemerintahan, bersama BNPT, TNI, POLRI dan PEMDA menjadi institusi terdepan dalam melakukan pencegahan terorisme. Agar pencegahan terorisme berhasil, institusi-institusi tersebut bersama dengan institusi pemerintahan lainnya dan masyarakat perlu melakukan sinergi. Terkait dengan upaya ini, maka perlu dilakukan pelatihan pencegahan terorisme bersama-sama sebagai langkah awal untuk menyamakan

persepsi dan melakukan kordinasi. Agar pelatihan ini bisa berjalan dengan efektif dan efisien diperlukan sebuah buku pedoman atau modul yang dapat dijadikan acuan semua pihak ketika mereka menjalankan kegiatan pencegahan terorisme.

Modul ini membahas tugas dan fungsi masing-masing lembaga dalam pencegahan terorisme di daerah dan langkah-langkah pemberdayaan lembaga maupun aparat TNI-AD, POLRI dan PEMDA dalam upaya pencegahan. Diharapkan dengan adanya pedoman ini, masing masing institusi dan aparat lebih memahami tugas dan fungsinya, memahami tugas lembaga lain yang mempunyai tanggung jawab yang sama. Sehingga dapat meningkatkan pemahaman sebagai langkah dalam melakukan kordinasi dalam rangka menuju sinerjitas dalam penanggulangan terorisme.

Jakarta, 19 Juli 2013

Deputi I Bidang Pencegahan,  
Perlindungan dan Deradikalisasi

**Mayjen TNI. Agus Surya Bakti**

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>1</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>3</b>
<b>BAGIAN I : PENDAHULUAN :</b>	
<b>LATAR BELAKANG DAN LANDASAN HUKUM</b>	<b>4</b>
I.1. Latar Belakang	4
I.2. Landasan Hukum	5
I.3. Pengertian	6
 <b>BAGIAN II : PEMBERDAYAAN UNSUR KESBANGPOL PEMDA, BINTER TNI dan BINMAS POLRI</b>	 <b>10</b>
II.1. Pengantar	10
II.2. Pemberdayaan Pemerintah Daerah	10
II.3. Pemberdayaan Binter TNI	19
II.3.1 Pemberdayaan TNI dalam OMSP	19
II.3.2 Pola Pemberdayaan BINTER	19
II.3.3 Satuan 81 KOPASSUS	20
II.3.4. Pemberdayaan BINMAS POLRI	21
 <b>BAB III : PERAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN TERORISME</b>	 <b>25</b>
III.1. Pendahuluan	25
III.2. Peran masyarakat dalam berbagai bidang dalam pencegahan terorisme	28
Daftar Tim Penyusun	32
Daftar Pustaka	33

# BAB I

---

## PENDAHULUAN: LATAR BELAKANG DAN LANDASAN HUKUM

### I.1. Latar Belakang

Terorisme merupakan ancaman nyata yang kita hadapi sebagai bangsa. Pemberantasan terorisme memerlukan strategi yang menggunakan pendekatan keras (*hard power*) dan pendekatan lunak (*soft power*). Pendekatan keras terdiri dari berbagai tindakan keamanan dan penegakan hukum. Pendekatan lunak terdiri dari berbagai program pencegahan agar serangan terorisme tidak terjadi. Kedua pendekatan tersebut perlu dilakukan secara, terarah, sistemik dan kosepsional dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Undang-undang dan peraturan yang berlaku menyebutkan bahwa pencegahan kejahatan terorisme bukan hanya menjadi tanggung jawab satu kementerian dan lembaga pemerintahan. Tanggung jawab pencegahan terorisme yang memerlukan pendekatan multi dimensi dan multi disiplin yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga pemerintahan dan juga masyarakat. Untuk itu semua pihak harus memiliki kesadaran untuk bekerja sama secara sinergi melakukan mencegah dalam rangka pemberantasan terorisme. Hal tersebut disadari karena akar masalah terorisme terkait dengan faktor-faktor korelatif yang tidak tunggal seperti ideologi, sejarah, ekonomi, psikologi, aspek keamanan dan politik. Keterlibatan berbagai instansi dalam fungsi pencegahan memang merupakan suatu keniscayaan, karena masing-masing instansi mempunyai spesialisasi tugas dan fungsi yang tidak bisa dijalankan oleh lembaga dan institusi lain.

Agar masing-masing kementerian lembaga dan masyarakat memahami tugas pokoknya dan tugas pokok tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga dan memahami tugas pokok dan fungsi lembaga lain, perlu dilakukan sosialisasi dan pelatihan bersama. Agar fungsi pencegahan nantinya bisa berjalan secara optimal, masing-masing lembaga perlu diberdayakan.

## **I.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4168);
2. Kep, 307/V/2011, 31 Mei 2011 Tentang pedoman Pelaksanaan Pembinaan Masyarakat Dalam Tugas Kepolisian Preemptif dan Preventif
3. Perkap No 7 Tahun 2008 Tanggal 26 September 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas POLRI
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Aksi Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4284);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4439);
7. Perpres 46/2010 dengan perubahannya Perpres No/ 12/2012
8. Peraturan Presiden Negara Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagai telah diubah dengan Peraturan Presiden Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012;
9. Keputusan Presiden Nomor 40/M Tahun 2012 tentang Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, diberikan Hak Keuangan, Administrasi dan Fasilitas lainnya Setingkat Menteri;
10. INPRES No. 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri;

11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor Per-01/K.BNPT/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
12. Keputusan KAPOLRI: Kep/307/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Masyarakat dalam Tugas Kepolisian Preemptif dan Preventif;
13. Keputusan Kabaharkam POLRI nomor : Kep/35/VI/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Ketertiban Masyarakat; Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Pelaksanaan Tugas BhabinkAMTIBMAS di Desa/Kelurahan tahun 2011.
14. SKEP TNI AD tentang Surat Keputusan KASAD tahun 2007. SKEP KASAD No Perkasad/234/XII/2007, dan Keputusan DANPUSDIKTER tentang BINTER;
15. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/88/XI/2009 tanggal 30 November 2009 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman TNI dalam Penanganan Terorisme.
16. SKEP Kemendagri tentang Kesbangpol tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 12 Tahun 2006, Tentang Kewaspadaan dini Masyarakat di Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 44 Tahun 2009, Tentang Pedoman kerja sama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan organisasi kemasyarakatan dan Nirlaba lainnya dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 16 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 Tentang KOMINDA.

### **I.3. Pengertian**

**I.3.1 BNPT merupakan lembaga negara non-kementrian yang dibentuk berdasarkan pada Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang diperbarui dengan peraturan presiden No 12 Tahun 2012. Badan ini memiliki kewenangan untuk menyusun kebijakan**

nasional penanggulangan terorisme, melakukan koordinasi antar lembaga pelaksana tugas dan fungsi dalam pencegahan terorisme

**I.3.2 Pencegahan Terorisme** adalah suatu upaya yang dilakukan agar tindak pidana terorisme yang diprediksi akan terjadi. Upaya ini meliputi pengawasan, kontra propaganda, kewaspadaan dan deradikalisasi.

**I.3.3 Kewaspadaan** merupakan aktivitas yang dimulai dengan menyiapkan bahan perumusan, koordinasi, kebijakan dan strategi serta mengumpulkan data awal tentang rencana kegiatan terorisme terutama pemetaan jaringan dan pendanaan terorisme. Kewaspadaan dilakukan dalam rangka mencegah aksi terorisme. (Pasal 46 Perkap BNPT/K.BNPT/10/2010)

**I.3.4 Kontra propaganda** dimaksudkan untuk memberikan perlawanan atau menangkal terhadap propaganda radikalisme baik melalui media center maupun media lainnya. Kontra propaganda dapat dilakukan melalui media cetak, elektronik, media sosial atau dalam bentuk kontra narrative (opini) di media-media cetak, website dan lain-lain.

**I.3.5 Deradikalisasi** merupakan segala upaya untuk menetralkan paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama, dan sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi atau terekspose paham radikal dan atau pro-kekerasan. Desain Deradikalisasi memiliki empat komponen, yaitu reedukasi, rehabilitasi, resosialisasi, dan reintegrasi.

**I.3.6 Pembinaan Teritorial (BINTER)** Merupakan salah satu tugas TNI yang dapat dilaksanakan sebagai bentuk tugas non tempur dalam rangka mendukung penegakkan hukum, melindungi keselamatan masyarakat dan mendukung kepentingan nasional lainnya. Binter

juga dapat digunakan mengumpulkan segala informasi terkait ancaman teror terhadap sasaran berupa instalasi penting, obyek vital dan alat transportasi massa Darat, laut dan udara di daerah seluruh Indonesia.

**I.3.7 Aparatur Teritorial** adalah aparat TNI AD (APTER) yang menjadi penyelenggara fungsi dan tugas pembinaan teritorial

**I.3.8 Kesbangpol** adalah salah satu lembaga dilingkungan Kementerian Dalam Negeri yang berfungsi melakukan pembinaan bangsa dalam bidang politik, persatuan dan kesatuan serta melaksanakan fungsi pencegahan, perlindungan dan deradikalisasi kepada masyarakat.

**I.3.9 Kesbanglinmas** adalah lembaga yang memiliki fungsi dalam pembinaan kesatuan bangsa dan politik serta sebagai lembaga dan aparat daerah yang memiliki peran spesifik dalam kaitannya dengan keamanan daerah.

**I.3.10 Pembinaan Masyarakat (BINMAS)** merupakan perangkat kelembagaan Polri yang berfungsi melakukan pembinaan terhadap warga masyarakat agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan ketaatan warga terhadap hukum dan perundang-undangan;

**I.3.11 Operasi Militer Selain Perang (OMSP)** adalah bentuk operasi TNI dalam membantu pemerintah dalam mendukung dan memperlancar program pemerintah/otoritas sipil, membangun kesadaran komponen masyarakat dari kemungkinan adanya niat untuk melakukan tindakan pelanggaran hukum yang dapat menimbulkan atau meningkatkan eskalasi menjadi kerusuhan massa serta menyelamatkan / mengamankan / mencegah berkembangnya kerugian jiwa dan harta benda untuk mengatasi kesulitan rakyat



yang timbul akibat kecelakaan atau bencana alam dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan rakyat.

## **BAB II**

---

# **PEMBERDAYAAN UNSUR KESBANGPOLPEMDA, BINTERTNI DANBINMAS POLRI**

### **II.1. Pengantar**

Bagian ini akan menjelaskan tentang pola-pola dan upaya memberdayakan unsur-unsur pemerintah dan negara yang ada di daerah yang meliputi; unsur pemerintahan daerah, BINTER TNI dan BINMAS POLRI. Ketiga instansi negara/pemerintah itu saling bersinergi dalam rangka pencegahan terorisme di daerah. Mengingat hampir semua daerah/provinsi di Indonesia memiliki jaringan dan pelaku terorisme yang terus mengancam keamanan masyarakat daerah.

### **II.2. Pemberdayaan Pemerintah Daerah.**

Sesuai dengan UU No 32 tentang pemerintahan daerah khususnya pasal 7 ayat 1, kepala daerah dan wakil kepala daerah berkewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat daerah. Pemerintah daerah (PEMDA) memegang peranan penting dalam pembangunan dan pemeliharaan dan pencegahan keamanan di daerah. PEMDA dapat menggunakan sumber daya birokrasi dan sistem pemerintahan daerah otonom untuk mencegah segala bentuk radikalisme, dan

terorisme. Langkah-langkah pemberdayaan yang perlu dilakukan oleh PEMDA adalah:

- a) PEMDA dapat membentuk peraturan daerah dan institusi/lembaga pelaksana perda itu untuk memperkuat fungsi dan manajemen keamanan daerah.
- b) PEMDA dapat menggunakan kewenangannya untuk mengatur pembuatan KTP dan pendataan warga secara lebih teliti, dan cermat.
- c) Upaya pencitaan demokrasi, HAM, kesejahteraan dan pendidikan politik warga secara tidak langsung mempengaruhi efektifitas strategi dan pola aksi dalam penanggulangan terorisme.

Aspek-aspek itu akan mengurangi munculnya terorisme. Hadirnya Inpres No. 2/2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri menjadi instrumen pemerintah dalam aspek:

*Pertama*, pelibatan pemerintah daerah dalam merespon saat terjadi gangguan keamanan daerah dengan senantiasa berkoordinasi dengan pusat (KESBANGPOL). *Kedua*, Inpres ini memudahkan koordinasi dan peran serta lembaga-lembaga penyelenggara fungsi pencegahan terorisme.

Gerakan dan strategi terorisme terus berubah. Karena itu, pemerintah Indonesia dituntut untuk dapat merespons dengan cepat serta memblokir setiap peluang yang memungkinkan ideologi terorisme tumbuh subur. Strategi komprehensif mesti ditempuh negara untuk membendung terorisme. Di satu sisi, upaya menciptakan kewaspadaan nasional perlu terus diperkuat dengan mengedepankan peran BNPT dan pemerintah pusat, tetapi di sisi lain, juga melalui pemberdayaan peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam pencegahan terorisme.

Selain itu dalam mencegah terorisme, perlu melihat secara obyektif karakteristik daerah, potensi yang dimiliki dan aspek yang mempengaruhi. Seberapa besar peranan masing-masing instansi terkait, aparat keamanan dan seluruh komponen masyarakat termasuk tingkat kewaspadaan bela lingkungan terhadap bahaya terorisme harus terukur dan teruji. Segala upaya untuk menghadang tindakan terorisme harus dilandasi tanpa mengorbankan kepentingan nasional dan sensitifitas SARA, pada hakekatnya kemajemukan identitas NKRI harus tetap terjaga. Oleh karena itu, upaya dan langkah strategis yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah daerah perlu meningkatkan supervisi, pembinaan dan pengawasan terhadap fungsi-fungsi program daerah yang terkait dengan fungsi pelayanan publik dalam bidang keamanan dan ketertiban daerah. KOMINDA merupakan salah satu instrumen penting dalam melakukan koordinasi dan asesmen terhadap situasi keamanan daerah.
- 2) Perlu difokuskan program otonomi daerah dalam bidang keamanan, mengingat daerah berpandangan bahwa kewenangan dan aktor penyelenggara fungsi keamanan adalah pihak pemerintah pusat. Sehingga perlu adanya sinergi pembinaan antara kementerian dalam negeri dengan kementerian teknis dengan "*rule of engagement*" yang jelas.
- 3) Dalam hal pembiayaan disektor keamanan, maka perlu ada langkah taktis dalam menggunakan dana-dana daerah (APBD) dalam aspek pembinaan dan dukungan operasional keamanan daerah, terutama untuk mendukung partisipasi masyarakat di daerah.

Mengapa daerah harus menjadi basis penting pencegahan terorisme, setidaknya didasarkan oleh dua alasan penting. *Pertama*, belakangan ini basis-basis organisasi terorisme tumbuh di sejumlah daerah. Dalam hal ini,

BNPT mengindikasikan potensi terorisme rawan terjadi setidaknya di lima belas provinsi di Indonesia. Provinsi-provinsi tersebut adalah Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Maluku.

*Kedua*, dalam upaya menghidupkan sistem deteksi dan siaga dini dalam pencegahan terorisme, daerah menjadi ujung tombak keberhasilannya. Sistem siaga dini pencegahan terorisme mengandaikan bahwa semua elemen bangsa, termasuk di dalamnya pemerintah daerah dan masyarakat lokal turut serta dalam upaya-upaya pencegahan menyebarnya ideologi dan gerakan terorisme. Penanggulangan terorisme tidak akan berhasil jika hanya bertumpu pada BNPT atau aparat keamanan semata. Terorisme adalah musuh bersama bangsa ini, sehingga penanggulangan dan pencegahannya menuntut peran serta seluruh elemen bangsa. Pemerintah daerah dan masyarakat lokal menjadi kunci bagi terbangunnya upaya pencegahan terorisme yang komprehensif, sinergis, dan terpadu.

Dua argumen tersebut menjadi landasan yang kuat untuk memperluas upaya-upaya pencegahan terorisme ke level daerah. Inilah yang menjadi faktor utama pentingnya pembentukan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di level daerah. FKPT ini nantinya bisa menjadi forum untuk merumuskan upaya-upaya pencegahan terorisme di daerah dengan melibatkan peran serta pemerintah daerah dan elemen-elemen masyarakat sipil.

Secara legal-formal, peran pemerintah daerah ini merujuk pada Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan

Gangguan Keamanan Dalam Negeri. Dalam Inpres Nomor 2 Tahun 2013 ini, untuk menjamin terciptanya kondisi sosial, hukum, dan keamanan dalam negeri yang kondusif dalam mendukung kelancaran pembangunan nasional, Presiden menginstruksikan kepada: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Menteri Dalam Negeri, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Panglima TNI, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kepala Badan Intelijen Nasional, Kepala BNPT, Kepala Badan Informasi Geospasial, Gubernur, dan Bupati/Walikota untuk meningkatkan efektivitas penanganan gangguan keamanan dalam negeri secara terpadu, sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Inpres Nomor 2 Tahun 2013 tersebut menjadi dasar bagi upaya-upaya bersama dan sinergis pencegahan terorisme sebagai salah satu gangguan keamanan dalam negeri, yang melibatkan peran serta pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur dan bupati/walikota, berkoordinasi dengan BNPT. Hal tersebut sesuai dengan tugas BNPT, seperti tertera dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012, yaitu:

- a) Menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme;
- b) Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme;
- c) Melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dengan membentuk satuan tugas-satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Pada bagian kedua dan ketiga dari tugas BNPT tersebut merupakan dasar bagi pemberdayaan pemerintah daerah, yang dikoordinasikan oleh BNPT, dalam penanggulangan terorisme termasuk di dalamnya upaya-upaya pencegahan terorisme.

Dalam Rencana Strategis Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi Tahun 2010-2014 juga disebutkan bahwa dalam kerangka kewaspadaan sebagai bagian dari program pencegahan terorisme, BNPT

- a) Merumuskan sistem deteksi dini di seluruh wilayah Indonesia sebagai upaya untuk meningkatkan kewaspadaan yang efektif guna mencegah aksi terorisme;
- b) Menciptakan jaringan pencegahan terorisme yang meliputi unsur-unsur pemerintah dan masyarakat (LSM, institusi sosial, institusi agama, institusi pendidikan, kelompok-kelompok sosial, forum-forum sosial, dan lain-lain);
- c) Mewujudkan sinergitas komponen masyarakat dan pemerintah agar memiliki kewaspadaan yang tinggi dalam pencegahan terorisme.

Dalam poin-poin tersebut tampak jelas bahwa unsur-unsur pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah, merupakan bagian penting dalam strategi BNPT mencegah terorisme secara terpadu dan menyeluruh. Sinergi BNPT, unsur-unsur pemerintah (pusat dan daerah), dan elemen-elemen masyarakat menjadi ujung tombak keberhasilan pencegahan terorisme di Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengamanan dalam negeri secara terpadu, Inpres Nomor 2 Tahun 2013 menginstruksikan

- 1) Pembentukan tim terpadu tingkat pusat dan tim terpadu tingkat daerah dengan mengikutsertakan semua unsur terkait, guna menjamin adanya kesatuan komando dan pengendalian serta kejelasan sasaran, rencana aksi, pejabat yang bertanggung jawab pada masing-masing permasalahan, serta target waktu penyelesaiannya. Jika di tingkat pusat, tim terpadu diketuai oleh Menkopolhukam, maka di tingkat daerah, tim terpadu diketuai oleh kepala pemerintah daerah, gubernur dan bupati/walikota
- 2) Mengatur penganggaran upaya-upaya peningkatan efektivitas penanganan gangguan keamanan dalam negeri dibebankan kepada APBN dan APBD. Ke depan, FKPT diharapkan mampu dan berhasil menjalankan tugasnyasehingga dapat menjadi contoh dalam rangka pembentukan tim terpadu peningkatan efektivitas penanganan gangguan keamanan dalam negeri di tingkat daerah.

Faktor penting yang memerlukan adanya penguatan peran pemerintah daerah dalam pencegahan terorisme:

- 1) Pemerintah daerah dan masyarakat lokal di daerah adalah institusi yang paling mengenali basis gerakan serta akar persoalan terorisme di daerahnya masing-masing. Pemerintah daerah mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan yang dihadapi di lingkungannya yang dapat menjadi faktor pemicu bagi gerakan terorisme. Karenanya, peran pemerintah daerah ini sangat krusial bagi upaya-upaya pencarian solusi bagi faktor pendorong gerakan terorisme. Misalnya, jika ekonomi menjadi sebab dukungan terhadap terorisme, maka penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat menjadi strategi untuk mencegah anggota masyarakat yang menghadapi persoalan ekonomi untuk turut serta dalam gerakan terorisme.



- 2) Pemerintah daerah dapat berperan efektif dalam melakukan identifikasi terhadap masuknya pengaruh ideologi teror dalam masyarakat. Pemerintah daerah pada dasarnya mengetahui secara lebih mendalam kondisi lingkungannya dan aktivitas-aktivitas mencurigakan yang mungkin dilakukan oleh para pelaku teror. Identifikasi ini kemudian diikuti dengan upaya menanamkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat, sehingga secara otomatis terbangun sistem siaga dini di dalam masyarakat tentang bahaya terorisme. Pemerintah daerah seyogyanya menjadi mata pertama yang bisa melihat masuk dan beroperasinya ideologi dan gerakan terorisme dalam masyarakat di daerahnya masing-masing.
- 3) Pemerintah daerah bisa menghidupkan dan memperkuat nilai-nilai kearifan lokal yang sudah mulai tergerus di daerahnya masing-masing. Kearifan lokal yang dimaksud adalah nilai-nilai yang sudah menjadi fondasi serta karakter berpikir dan berinteraksi yang sudah mengakar dalam masyarakat Indonesia. Nilai-nilai kearifan lokal memang bisa berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Namun secara umum semua daerah memiliki karakter yang sama, yaitu berupa nilai-nilai tenggang rasa, gotong royong, saling menghormati sesama, dan menghargai perbedaan. Karena kearifan lokal itulah masyarakat misalnya memberikan toleransi agama tetangganya yang berbeda, rumah ibadah agama lain yang dibangun secara berdekatan, serta membuat masyarakat mampu mengesampingkan intoleransi dan kekerasan.

Munculnya tindakan teror sejauh ini dikarenakan para pelaku tidak lagi memahami dan menggunakan nilai-nilai luhur tersebut sebagai panduan dalam berinteraksi dengan warga negara lainnya. Para pelaku teror terkontaminasi oleh nilai 'asing' yang mengajarkan eksklusivitas, puritan, intoleran, hingga mendukung aksi

kekerasan. Inilah yang melahirkan konservatisme dan radikalisme dalam masyarakat yang pada akhirnya berujung pada tindakan-tindakan intoleran. Pemerintah daerah bersama-sama semua unsur di masyarakatnya diharapkan mampu memperkuat dan menginternalisasikan kembali nilai-nilai luhur (kearifan lokal) tersebut.

- 4) Pemerintah daerah juga bisa memberdayakan forum-forum dialog baik intra-agama maupun antar-agama (*interfaith dialogue*) di daerahnya. Forum ini berfungsi sebagai media komunikasi untuk membangun saling pengertian dan toleransi terhadap perbedaan. Semakin sering dialog ini dilakukan akan semakin besar kemungkinan tumbuhnya harmonisasi dan semangat pluralitas di dalam masyarakat dan perbedaan tidak lagi disikapi dengan kekerasan. Inilah di antara yang menjadi fondasi penting dalam pembangunan bangsa (*nation building*).
- 5) Pemerintah daerah berperan penting dalam mengidentifikasi dan mengontrol pengaruh-pengaruh luar yang dapat mengancam eksistensi kearifan lokal atau bahkan ikatan kebangsaan secara cepat. Misalnya, beberapa tokoh agama mengajarkan penafsiran agama di luar arus utama atau yang menyerukan kekerasan. Bahkan dalam ceramah-ceramah agama mereka mendakwahkan ajakan ofensif yang tidak sejalan dengan nilai-nilai lokal masyarakat yang luhur. Saat ini terjadi, pemerintah daerah, baik melalui FKPT maupun forum-forum kemasyarakatan yang lain, bisa memberikan masukan-masukan penyeimbang terhadap apa yang sudah disampaikan dan melakukan dialog dengan para penceramah yang memiliki pandangan yang konservatif tersebut.

## **II.3. Pemberdayaan Binter TNI**

### **II.3.1 Pemberdayaan TNI dalam OMSP**

- a) Bersifat tempur. Membantu pemerintah dalam mengerahkan kekuatan wilayah pertahanan beserta kekuatan pendukungnya mengatasi, menanggulangi, menjaga, mencegah dari kemungkinan bentuk ancaman non militer yang dapat membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa.
- b) Bersifat non tempur. Membantu pemerintah dalam mendukung dan memperlancar program pemerintah/otoritas sipil, membangun kesadaran komponen masyarakat dari kemungkinan adanya niat untuk melakukan tindakan pelanggaran hukum yang dapat menimbulkan atau meningkatkan eskalasi menjadi kerusuhan massa serta menyelamatkan / mengamankan / mencegah berkembangnya kerugian jiwa dan harta benda untuk mengatasi kesulitan rakyat yang timbul akibat kecelakaan atau bencana alam dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan rakyat.

### **II.3.2 Pola Pemberdayaan BINTER**

Diselenggarakan secara terus menerus, terencana, terpadu dan berkelanjutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dilaksanakan oleh setiap personil TNI AD baik yang bertugas dalam negeri maupun penugasan di luar negeri. Dilaksanakan secara berdiri sendiri, maupun bersama pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya untuk tujuan pertahanan, kesejahteraan dan sesuai tugas pokok TNI.

Pembinaan teritorial TNI dapat dimaksimalkan untuk mencegah terjadinya terorisme. BINTER TNI dapat dilaksanakan sebagai bentuk

tugas non tempur dalam rangka mendukung penegakkan hukum, melindungi keselamatan masyarakat dan mendukung kepentingan nasional lainnya. Pembinaan teritorial (BINTER) TNI juga dapat secara efektif mengumpulkan segala informasi terkait ancaman teror terhadap sasaran berupa instalasi penting, obyek vital dan alat transportasi massa Darat, laut dan udara di daerah seluruh Indonesia. Satuan Komando Kewilayahan (SATKOWIL) dapat membantu kepolisian RI dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana diatur dalam UU.

### **II.3.3 Satuan 81 KOPASSUS**

Satuan 81 Kopassus membantu POLRI dalam menegakkan keamanan dan ketertiban khususnya dalam menanggulangi teror. Selain itu, BINTER diarahkan sebagai usaha dan kegiatan yang berhubungan dengan penyusunan, pengerahan dan pengendalian terhadap unsur-unsur wilayah yang berupa geografi, demografi, sumber daya alam dan lainnya. Dalam hubungannya dengan pencegahan terorisme, BINTER merupakan upaya meniadakan sumber kerawanan yang mungkin timbul dalam kehidupan masyarakat, sehingga BINTER dapat dimungkinkan perannya yang tinggi dalam pencegahan segala ancaman dan potensi terorisme.

Dalam rangka pemberdayaan Binter TNI yang terkait langsung dengan pencegahan terorisme adalah sebagai berikut:

- a. sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak yang diakibatkan aksi kelompok teroris
- b. bersama instansi terkait mengajak masyarakat meningkatkan Pam Swakarsa untuk mencegah masuknya kelompok teroris di wilayahnya.

- c. membentuk dan membina mitra karib sebagai jaring informan di wilayah
- d. membantu melokalisir tempat kejadian akibat aksi terorisme.
- e. membantu mengamankan obyek vital
- f. membantu melaksanakan evakuasi korban, apabila ada serangan dari teroris dengan koordinasi pada aparat terkait
- g. meningkatkan kepekaan masyarakat terhadap provokasi terorisme
- h. melakukan koordinasi dengan aparat terkait tentang informasi kegiatan terorisme, tempat-tempat yang menjadi kemungkinan sasaran terorisme
- i. membantu mendata serta menginventarisir orang-orang yang bukan penduduk setempat untuk melaporkan diri kepada yang berwajib
- j. meningkatkan kegiatan temu cepat dan lapor cepat
- k. mengajak dan memotivasi masyarakat agar tercipta rasa persatuan dan kesatuan, rasa persaudaraan di kalangan masyarakat memberikan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan terorisme saat ini

#### **II.3.4. Pemberdayaan BINMASPOLRI**

POLRI sebagai inti pembina KAMTIBMAS bertugas dan bertanggungjawab untuk melaksanakan pembinaan teknis terhadap segala kegiatan dan pekerjaan yang meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian dalam rangka membimbing, mendorong, mengarahkan dan menggerakkan masyarakat untuk taat kepada peraturan / perundang-undangan dan norma-norma sosial lainnya serta berperan aktif

menciptakan memelihara dan meningkatkan ketertiban dan keamanan bagi diri dan lingkungannya dalam bentuk sistim keamanan swakarsa.

Pemberdayaan pembinaan KAMTIBMAS dilaukanoleh instansi-instansi diluar POLRI yang berbeda dalam sasaran dan metode kerja tapi memiliki keterkaitan kepentingan dan saling keterkaitan dengan tujuan yaitu terciptanya KAMTIBMAS. Potensi keamanan lainnya (TNI, POLSUS, PPNS dan bentuk PAMSWAKARSA) dapat mendukung setiap bentuk kegiatan pembinaan KAMTIBMAS. Masyarakat yang memiliki potensi seperti FKPM, KBPPP, POKDAR, Dai KAMTIBMAS, SAKA Bhayangkara, Satpam dan Poskamling dapat membantu menciptakan KAMTIBMAS.

POLRI memiliki wadah dan lembaga yang dapat diberdayakan untuk melaksanakan fungsi pencegahan terhadap terorisme.Beberapa diantaranya adalah BABINKAMTIBMAS, struktur POLRES sampai pada tingkat POLSEK dan pospol, dan intelijen POLRI dapat digunakan untuk menangkal dan mencegah munculnya radikalisme dan terorisme.POLRI perlu memaksimalkan peran Pemolisian masyarakat (Polmas) yang berbasis pada kemitraan dengan warga dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai prinsip HAM dan demokrasi.Oleh karenanya, perlu pemberdayaan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) dan Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat (BKPM).

Dalam rangka mendukung POLSEK sebagai basis deteksi, BABINKAMTIBMAS merupakan petugas POLRI di garis terdepan menjadi mata dan telinga serta menjadi informan dalam deteksi dini;Bersama aparat lintas sektoral lainnya melakukan sosialisasi dalam rangka mencegah dampak buruk sebagai akibat terjadinya tindak pidana terorisme; Bersama dengan forum kemitraan, komunitas dan instansi terkait lainnya melaksanakan tatap muka, kunjungan dan sambang, ceramah, bimbingan dan penyuluhan, peneranganmasyarakat, penataran, pengajaran, pelatihan

dan pendidikan kepada masyarakat, pengumpulan pendapat masyarakat, penertiban masyarakat dan rehabilitasi.

a) Pemberdayaan BINMASPOL pada Tingkat POLDA, POLRES dan jajarannya

- 1) Melakukan pembinaan terhadap warga masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan;
- 2) Melakukan upaya kegiatan kerjasama yang baik dan harmonis dengan aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat dan para sesepuh yang ada di desa atau kelurahan;
- 3) Melakukan pendekatan dan membangun kepercayaan terhadap masyarakat;
- 4) Melakukan upaya pencegahan tumbuhnya penyakit masyarakat;
- 5) Melakukan upaya peningkatan daya tangkal dan daya cegah warga masyarakat terhadap timbulnya gangguan KAMTIBMAS;
- 6) Membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam rangka pembinaan KAMTIBMAS secara Swakarsadi desa atau kelurahan;
- 7) Melakukan kerjasama dan kemitraan dengan potensi masyarakat dan kelompok atau forum KAMTIBMAS guna mendorong peran sertanya dalam BINKAMTIBMAS dan dapat mencari solusi dalam penanganan permasalahan atau potensi gangguan dan ambang gangguan yang terjadi di masyarakat agar tidak berkembang menjadi gangguan nyata KAMTIBMAS;
- 8) Menumbuhkan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum dan perundang-undangan;

- 9) Memberikan bantuan dalam rangka penyelesaian perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- 10) Memberikan petunjuk dan melatih masyarakat dalam rangka pengamanan lingkungan:
- 11) Memberikan pelayanan terhadap kepentingan warga masyarakat untuk sementara waktu sebelum ditangani pihak yang berwenang;
- 12) Menghimpun informasi dan pendapat dari masyarakat untuk memperoleh masukan atas berbagai isu atau kisaran suara tentang penyelenggaraan fungsi dan tugas pelayanan kepolisian serta permasalahan yang berkembang dalam masyarakat.



## **BAB III**

---

# **PERAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN TERORISME**

### **III.1 Pendahuluan**

Upaya pemberantasan terorisme bukan hanya tugas pemerintah tetapi juga menjadi tugas seluruh lapisan masyarakat sehingga semua harus berpartisipasi secara aktif dan terkoordinasi. Demikian pula dalam hal perlindungan dan deradikalisasi terhadap masyarakat dari pengaruh dan fundamentalisme/radikalisme sangatlah diperlukan. Mengingat unsur-unsur masyarakat yang sangat luas dan kompleks, maka diperlukan asesmen dan seleksi terhadap berbagai potensi masyarakat yang tergabung dalam institusi-institusi dan organisasi sosial yang berkembang di kalangan masyarakat. Organisasi dan kelompok masyarakat yang perlu dijadikan sasaran kerjasama yaitu seperti NU, Muhammadiyah, FKPP, Pramuka, dan organisasi masyarakat lainnya.

Di Indonesia, terdapat banyak unsur tokoh-tokoh non-formal yaitu tokoh adat, tokoh agama, dan elite lokal lainnya perlu diberdayakan secara optimal dalam pencegahan terorisme di seluruh daerah. Adapun strategi dan pola pelibatan unsur-unsur masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan sosialisasi kebijakan pemerintah tentang penanggulangan terorisme, bahaya yang ditimbulkan akibat aksi-aksi terorisme, dan pentingnya peran masyarakat dalam pencegahannya. Di bawah ini adalah sejumlah langkah yang perlu dilakukan dalam konteks peran serta masyarakat sebagai berikut:

- 1) Proaktif membangun komunikasi, interaksi dan hubungan dengan unit terkecil dalam masyarakat, mulai dari institusi keluarga, sampai masyarakat lingkungan terdekat. Hal ini amat perlu dilakukan untuk mengetahui secara dini peta kondisi masyarakat secara ekonomi, sosial, agama, politik, keamanan dan sebagainya.
- 2) Pemberdayaan kaum muda ke dalam aktifitas positif, bersifat produktif dan membangun. Sehingga kaum muda sebagai elemen yang energik dan dinamis bisa menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan. Banyaknya organisasi kepemudaan di berbagai lapisan strategis dengan beragam corak dan warna, dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk membina pemuda kontra-terorisme seperti KNPI, BEM, HMI, GMNI, IMM, PMII dan sebagainya.
- 3) Mendayagunakan organisasi-organisasi sosial seperti majelis taklim, forum alumni pondok pesantren, *sport club*, perkumpulan arisan, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Slanker's Club, Komunitas Punk, Karang Taruna, dan lain sebagainya.
- 4) Melakukan *mapping* terhadap individu atau kelompok masyarakat yang berpotensi menjadi pelaku teroris, seperti orang yang mengontrak rumah atau kos di lingkungan masing-masing, orang-orang tertentu yang mencurigakan dilingkungan tempat tinggal kita khususnya tamu dan "*pendatang asing*" yang menginap tanpa terlebih dahulu melapor.

Peran masyarakat dalam pencegahan terorisme sangat tergantung pada terpenuhinya tata kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Dari sisi ideologi, masyarakat dapat memahami dan mengamalkan Pancasila sebagai ideologi negara. Aspek politik dan otonomi daerah dimana masyarakat dapat berperan dalam upaya menciptakan keamanan dan

26 | Pemberdayaan Binter TNI, Binmas Polri dan Pemda dalam Pencegahan Terorisme

ketertiban dalam masyarakat. Sedangkan pada aspek ekonomi, masyarakat memiliki tingkat/taraf kesejahteraan yang layak, dan dalam aspek keamanan di mana masyarakat dapat mendukung peran aparaturnegara dalam bidang keamanan masyarakat.

Sebagai wujud dari pendekatan ideologis dan berbasis wawasan kebangsaan terhadap pencegahan terorisme yaitu dengan partisipasi masyarakat dalam upaya bela negara. Partisipasi warga masyarakat dapat diaktualisasikan ke dalam penyelenggaraan pertahanan negara, dengan menumbuhkan semangat bela negara, diselenggarakan melalui : pendidikan kewarganegaraan dengan materi, nilai-nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara, nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia dan lingkungan hidup, kerelaan berkorban untuk masyarakat, bangsa dan negara, serta kemampuan awal bela negara. Konsep bela negara bagi warga bukan saja merupakan wujud dari nasionalisme, cinta tanah air, tetapi juga mendorong sikap kebangsaan yang inklusif atau sikap *demi nation*.

Bentuk nyata dari bela negara dapat berupa pembelaan terhadap kepentingan nasional, integritas dan moral bangsa, perlindungan terhadap wilayah negara baik di Darat, laut dan Udara serta turut serta dalam pembangunan dan kesejahteraan bangsa dan negara. Bentuk kongkrit dari upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa adalah dapat diwujudkan dengan kesadaran untuk selalu membina kerukunan, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dalam konteks kekinian, nasionalisme dapat berupa gerakan moral untuk memperjuangkan bangsa dan tata kelola pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, serta menghormati hukum dan hak asasi manusia. Bila bentuk Bela Negara dikonstruksikan ke dalam upaya pencegahan terorisme, maka pendekatan peran serta masyarakat

yang dilakukan adalah dengan mengangkat aspek-aspek Bela Negara itu sebagai media komunikasi dan sosialisasi terhadap segala potensi masyarakat yang diperlukan guna memiliki kesadaran dan kemauan untuk bersama-sama mencegah munculnya terorisme.

Selain itu upaya meningkatkan peran serta masyarakat guna menjaga tatanan kehidupan masyarakat yang aman dalam rangka mendorong dan memotivasi mereka untuk melakukan pencegahan terorisme adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan peran serta masyarakat sekuriti untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi.
2. Meningkatkan akses berbagai peluang politik dan kekuasaan dalam rangka stabilitas politik.
3. Mewujudkan kemampuan pengelolaan ekonomi dan sumber-sumber kekayaan alam secara terkendali untuk kelangsungan tersedianya kebutuhan pokok masyarakat lokal.
4. Mewujudkan kebersamaan dan kesetiakawanan sosial masyarakat lokal yang dapat mencegah dan mengatasi disintegrasi bangsa.
5. Mewujudkan kesadaran dan pemahaman bahwa pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia adalah tanggung jawab bersama seluruh rakyat Indonesia.

### **III.2 Peran masyarakat dalam berbagai bidang dalam pencegahan terorisme**

1. Bidang Agama, pendidikan dan dakwah

- a. Mengadakan latihan kepemimpinan dan kebangsaan remaja masjid, rohis dan aktivis dakwah kampus dengan membentuk secara khusus kader gerakan anti-terorisme dan penguatan sosialisasi bahaya terorisme ke para jama'ahnya.
  - b. Menyelenggarakan pendidikan kebangsaan untuk guru-guru pendidikan agama Islam terhadap ancaman terorisme agar disosialisasikan ke murid-muridnya.
2. Bidang pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya dan hukum.
  - a. Mengadakan pelatihan kewirausahaan untuk kalangan muda agar memiliki kemandirian ekonomi dengan harapan agar menutup peluang keterlibat dalam aksi terorisme.
  - b. Menyelenggarakan pentas budaya dan festival keraton nusantara dengan mengusung tema anti terorisme dan kecintaan terhadap realitas multikulturalisme.
  - c. Mengintensifkan kajian empat pilar kebangsaan dan Bhineka tunggal ika untuk pemuda agar dijauhi dari sikap sektarianisme yang menyebabkan terjadinya aksi terorisme.
3. Bidang pemberdayaan media massa, humas dan sosialisasi
  - a. Melakukan konsolidasi digital dengan membuat blogger cinta damai untuk kampanye pencegahan terorisme
  - b. Membangun aliansi jurnalis yang aktif mempropagandakan semangat anti terorisme dengan pembentukan konsorsium tolak terorisme
  - c. Membuat grup facebook, twitter dan website anti-terorisme
4. Bidang pemberdayaan pemuda dan perempuan
  - a. Mengadakan porseni antar remaja masjid dan aktivis dakwah kampus melalui olahraga dan seni

- b. Mensosialisasikan bahaya terorisme di kalangan ibu pekerja dan komunitas arisan
  - c. Membangun basis anti terorisme di institusi keluarga dengan membentuk korps keluarga anti terorisme
5. Bidang kajian dan peneliti
- a. Melakukan riset partisipatoris terhadap ideologi radikal
  - b. Menerbitkan buletin, buku dan laporan penelitian mengenai sumber pendanaan terorisme
  - c. Menyebar jejaring peneliti pemuda dengan menyusupkan ke jantung-jantung kelompok radikal sekaligus menyadap data, info dan dinamika ideologi aksi terorisme.

Peran serta masyarakat merupakan bagian penting dari kesadaran hukum setiap warga negara. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 UU No. 15 Tahun 2003 *bahwa setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, akan dipidana dengan penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lambat 15 (lima belas) tahun.* UU No 15 itu menegaskan bahwa warga negara berkewajiban untuk tidak membantu, melindungi dan bekerjasama dengan pelaku terorisme. Sebaliknya setiap warga masyarakat dituntut untuk melaporkan dan memberikan informasi terkait terorisme kepada aparat negara terkait yaitu Kesbangpol Linmas PEMDA, Binter TNI dan Binmas POLRI. Kesadaran masyarakat untuk melaporkan terhadap upaya-upaya jahat untuk melakukan tindakan terorisme sangat diperlukan guna melindungi dan mendeteksi dini setiap bentuk kejahatan teror yang muncul. Munculnya aksi-aksi terorisme di negeri kita banyak disebabkan oleh faktor kurangnya partisipasi publik. Sensitivitas dan tingkat kewaspadaan masyarakat menjadi perlu dan dibutuhkan untuk ditingkatkan di masa depan, terutama terkait dengan gejala-gejala mencurigakan yang

ditunjukkan oleh seseorang atau sekelompok orang yang tidak lazim dilakukan oleh masyarakat pada umumnya.

Peran serta masyarakat dapat ditingkatkan dalam meningkatkan kualitas proses penegakkan hukum anti terorisme, sebagaimana terdapat dalam Pasal 33 UU No 15: “...*bahwa saksi, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa beserta keluarganya dalam perkara tindak pidana terorisme wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.*” Pasal ini mengandung pengertian bahwa pemerintah menjamin keselamatan terhadap warga negara yang berpartisipasi dalam proses hukum terhadap para pelaku tindakan terorisme.

Dengan demikian, warga masyarakat dapat bekerja sama dengan aparat pemerintah terkait untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan hukum terhadap kemungkinan terjadinya efek teror dan sebagainya pada para saksi yang berperan pendukung proses hukum yang adil dan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.

# **DAFTAR TIM PENYUSUN**

## **PENANGGUNG JAWAB:**

DEPUTI 1

BIDANG PENCEGAHAN, PERLINDUNGAN DAN DERADIKALISASI  
BNPT

MAYJEN TNI AGUS SURYA BAKTI

## **TIM AHLI/ EDITOR**

DR. SRI YUNANTO, M.SI

## **PENULIS 1:**

DRS. M. MUSOFFA M.Ag., M.H

ANGEL DAMAYANTI, M.SC., MSI

SIDRATAHTA MUKHTAR, M.SI

TRI ANDRIYANTO, S.IP

DEVINA K., S.IP

MAWARDIN, S.IP

## **REVIEWER**

Dr. ROBI NURHADI M.Si.

ASISTEN TERITORIAL TNI-AD

DIREKTUR BINMAS POLRI



## DAFTAR PUSTAKA

AS Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, Oxford: Oxford University Press, 1995, cet. ke-5

Amir Syamsuddin, "Menegakkan Hukum Tanpa Rasa Keadilan", Kompas Cyber Media, 30 Juli 2004

BNPT, *Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2010-2014*

Indriyanto Seno Adji, "Terorisme dan HAM" dalam *Terorisme: Tragedi Umat Manusia*, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta, 2001

Indriyanto Seno Adji, SH, MH, "Terorisme" Perpu No. 1 Tahun 2002 dalam perspektif hukum pidana

John Brown, "The Purposes and Cross-purposes of American Public Diplomacy", dalam [http://www.unc.edu/depts/diplomat/archives\\_roll/2002\\_07-09/brown\\_pubdipl/brown\\_pubdipl.html#Anchor\\_bio](http://www.unc.edu/depts/diplomat/archives_roll/2002_07-09/brown_pubdipl/brown_pubdipl.html#Anchor_bio)

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, *Buku Petunjuk Deradikalisasi Terbaru*, Agustus 2009.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polisi*

Kolonel Inf Loudewijk F Paulus, Kopassus, *Terorisme*, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan RI

Kristin Archik, *Europe and Counterterrorism: Strengthening Police and Judicial Cooperation, Washington DC: Congressional Research Service Report*, 23 Agustus 2004, hal. 22; David Cortright & George A. Lopez (eds.), *Uniting Against Terror: Cooperative Non-military Responses to the Global Terrorist Threat*, Cambridge, Mass: MIT.

Markas Besar Angkatan Darat, *Materi Cegah Tangkal Bahaya Terorisme Terhadap Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta, Oktober 2011

M. Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1988, cet. ke-3

Mohamad Mova al Afghani, "Kampanye Melawan Terorisme telah Merusak Tatahan Hukum", diakses dari <http://www.theceli.com.berita/detail.php?tipe='a'&news=101>

Naskah Sementara Doktrin TNI Angkatan Darat Kartika Eka Paksi

Petrus Reinhard Golose, *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach, dan Menyentuh Akar Rumput*, YPKIK, Jakarta, 2009

Pemerintah AS, National Strategy for Combating Terrorism

Reza Ahmad Syaiful, *Pembentukan badan Penanggulangan Terorisme di Indonesia*, FISIP UI, 2010

Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tahun 2010-2014

Rencana Strategis BNPT periode Tahun 2010-2014

Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Poliiik, Hukum dan Keamanan Tahun 2010-2014

Rhousdy Soeriaatmadja dan Brigjen Pol (Pur) Ivan T.H. Sihombing, *Kiprah DKPT Dalam Situasi Kontroversi Dan Keterbatasan(2003-2009)*

Serasehan dan Pembekalan Ketua RW dan Tokoh Masyarakat di DKI Jakarta, Peningkatan Pemahaman Tentang Potensi Konflik dan Kerawanan Sosial di DKI Jakarta. Diselenggarakan oleh KESBANGPOL Provinsi DKI Jakarta, 12 April 2012, Hotel Purnama Putra, Cipayung, Jawa Barat.

[www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id). Diakses pada 13 April 2013